

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional. Ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan ialah Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila PDB meningkat, maka perekonomian suatu negara juga meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan strategi pemberdayaan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Hapsari *et.al.*, 2014).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena penyerapan tenaga kerjanya yang tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil (Rahayu, 2016). UMKM merupakan sektor yang mampu bertahan saat krisis ekonomi pada tahun 1998. Pasca krisis, jumlah UMKM terus bertambah hingga mampu menyerap 97% tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja nasional (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Di Indonesia terdapat 99,90% unit usaha yang berbentuk UMKM, dimana 98,85% dari jumlah UMKM tersebut didominasi oleh usaha mikro. Disamping itu, UMKM juga telah menyerap 96,99% tenaga kerja dan menghasilkan 57,60 % Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Tempo, 2018).

Salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM cukup tinggi di Indonesia adalah Sumatera Barat. Sesuai data statistik tahun 2019, jumlah UMKM di Sumatera Barat ada sebanyak 593.100 unit. Dari jumlah tersebut, pelaku usaha mikro ada sebanyak 531.350 unit atau 89,59 persen, sedangkan pelaku usaha kecil sebanyak 53.341 unit atau 9,01 persen. Kemudian pelaku usaha menengah ada sebanyak 7.990 unit atau 1,33 persen dan untuk pelaku usaha besar sebanyak 419 unit atau 0,007 persen (Republika, 2019).

Berikut merupakan jumlah UMKM di Sumatera Barat:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Kepulauan Mentawai	4,624	0.80
2	Pesisir Selatan	42,495	7.32
3	Kab.Solok	37,115	6.40
4	Sijunjung	29,056	5.01
5	Tanah Datar	45,137	7.78
6	Padang Pariaman	43,576	7.51
7	Agam	56,592	9.75
8	Lima Puluh Kota	47,549	8.19
9	Pasaman	25,981	4.48
10	Solok Selatan	15,559	2.68
11	Dharmasraya	22,409	3.86
12	Pasaman Barat	38,574	6.65
13	Padang	89,699	15.46
14	Kota Solok	9,843	1.70
15	Sawahlunto	8,719	1.50
16	Padang Panjang	9,089	1.57
17	Bukittinggi	22,200	3.83
18	Payakumbuh	18,996	3.27
19	Pariaman	13,131	2.26
<b>Jumlah</b>		<b>580,344</b>	<b>100</b>

Sumber:bps.go.id, tahun 2018

Berdasarkan **Tabel 1.1** dapat dilihat bahwa UMKM yang berada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 berjumlah 580.344 unit. Dari 19 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah UMKM terbanyak dengan total 89.699 unit atau sebesar 15,46%. Jumlah ini akan terus tumbuh dan bertambah setiap tahunnya.

Pada Desember 2019, Minangkabau World Foundation (MWF) bekerjasama dengan LPPOM, MUI, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan 20 sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Ketua Dewan Pembina MWF Syukri Bey mengatakan, ada tiga isu yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, isu terhadap bisnis halal secara global. Kedua, isu tentang UU 33 tahun 2014 regulasi pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM bahkan usaha besar untuk mempercepat produk halal. Ketiga, hadir sebuah lembaga bernama yayasan MWF di Sumatera Barat (Tribunnews, 2019).

Akibat adanya regulasi pemerintah yang mendorong pelaku UMKM mempercepat produk halal, menyebabkan para pengusaha semakin gencar meningkatkan religiusitas pada UMKM. Religiusitas dapat dikatakan sebagai sikap atau kesadaran yang muncul atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap agama. Sebagian orang berpendapat bahwa spiritualitas atau religiusitas tidak ada hubungannya dengan kegiatan bisnis. Agama hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ritual (*ibadah mahdhah*), ibadah hanya ada di tempat-tempat ibadah saja bukan di sentra-sentra bisnis.

Kita sudah lama mempunyai pandangan bahwa *business is business*, memisahkan urusan bisnis dari religiusitas dan nilai. Menurut pandangan ini, bisnis dan religiusitas adalah dua entitas yang tidak mungkin disatukan. Spiritualitas atau religiusitas dalam bisnis dapat menyebabkan ketidakluwesannya dalam berbisnis. Misalnya, larangan unsur riba dalam kegiatan perekonomian dalam agama seperti Islam. Padahal, unsur ini sangat banyak digunakan dalam dunia bisnis (Ma'zumi, 2017).

Pengusaha yang memiliki religiusitas tinggi cenderung kepada ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnisnya. Motif untung dan rugi secara ekonomi memang sangat penting dalam menjalankan praktek bisnis. Akan tetapi apabila dihadapkan pada ajaran agama yang melarang menggunakan riba, maka pengusaha yang memiliki religiusitas tinggi akan memperkuat sikap positifnya dan meninggalkan riba (R. Ery Wibowo, 2014).

Religiusitas bersifat sangat abstrak dan subyektif. Dalam perspektif ini, sejauh mana tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan, termasuk UMKM. Pada realita yang terjadi di sekitar kita menunjukkan bahwa religiusitas mulai banyak ditinggalkan oleh para pelaku bisnis, baik UMKM maupun skala besar dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Selain religiusitas, salah satu hal yang penting bagi UMKM yaitu pengetahuan dalam mengelola dan melakukan perencanaan keuangan pada usahanya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia adalah paling besar dibandingkan negara lain,

akan tetapi tingkat literasi keuangannya tergolong rendah. Pemahaman literasi keuangan pada penduduk Indonesia hanya 22%. Disisi lain, Bank Indonesia (2016) juga mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan tergolong rendah terhadap pengelolaan bisnisnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi suatu negara yang meliputi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan akan lebih mudah dicapai apabila penduduk negara tersebut memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang rendah akan mengalami kesulitan akses ke lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak mengenal produk perbankan, masyarakat ini dikategorikan sebagai *unbanked people* (Bonita, 2017).

Literasi keuangan tidak hanya berperan penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Literasi keuangan juga sangat diperlukan bagi para pelaku usaha, karena literasi keuangan erat kaitannya dengan manajemen keuangan (Laily, 2013). *Financial literacy* merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pada pengusaha mikro, dimana literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam membuat keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga serta kelangsungan hidup bisnis (Fatoki, 2014).

Tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat menolong UMKM untuk menghadapi situasi yang sulit sehingga bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu bentuk literasi keuangan yang dapat dilakukan pelaku umkm adalah mengenai penganggaran. Keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategis bagi pelaku UMKM dalam memutuskan investasi ke

arah penciptaan produk baru, pembelian peralatan maupun ekspansi pasar baru. Keputusan investasi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan akan tetapi, apabila keputusan tidak tepat dapat membahayakan kelangsungan hidup UMKM tersebut (Sari dalam Iskandar, 2018).

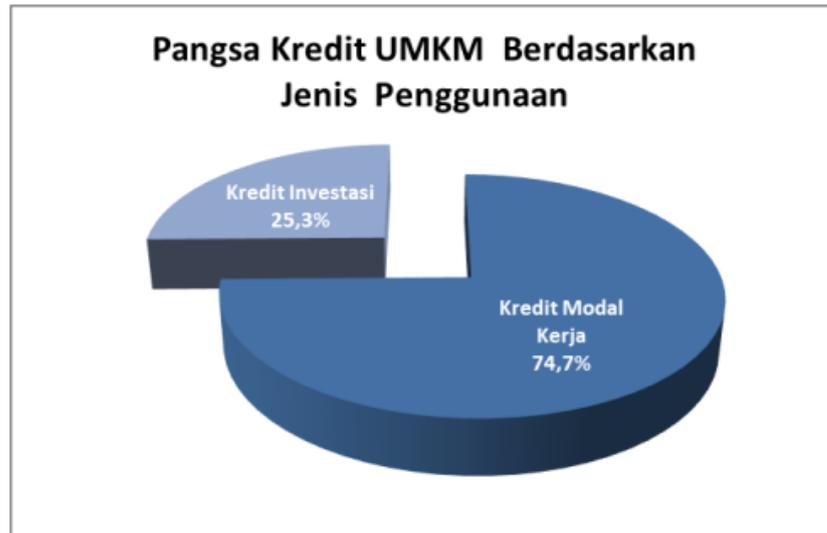
Hal yang perlu dikuasai oleh UMKM selanjutnya ialah analisis kinerja, dimana analisis kinerja (*performance*) diperlukan untuk memberikan umpan balik dalam meningkatkan peran dan posisi suatu perusahaan. Peran UMKM beberapa tahun terakhir dinilai strategis, tetapi kinerjanya belum maksimal dalam menghadapi persaingan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala dan hambatan yang harus dihadapi UMKM, terutama dalam akses pendanaan, teknologi produksi, pemasaran, keterampilan, dan akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Beberapa faktor penyebab rendahnya kinerja UMKM di antaranya: UMKM masih menggunakan teknologi tradisional, pangsa pasar yang rendah, dan tidak dapat memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan dari bank, serta tingkat ketergantungan terhadap pemerintah cenderung besar (Ardiana *et.al.*, 2010).

Awalnya, pengukuran kinerja hanya didasarkan pada aspek finansial, akan tetapi seiring berjalannya waktu, pengusaha menyadari bahwa aspek non finansial merupakan bagian penting dalam pencapaian suatu kinerja. Pengukuran kinerja finansial hanya menitikberatkan pada keuntungan yang tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk mengukur kinerja usaha, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (Islami, 2017).

Pengukuran kinerja UMKM berbeda dengan perusahaan besar karena karakteristik usahanya berbeda. Perbedaan UMKM dengan perusahaan besar terjadi karena sumber daya manusia dan keuangan terbatas, beroperasi pada pasar yang sempit, serta struktur yang sejajar dan fleksibel. Keterbatasan sumber daya pada UMKM membuat kualitas dan waktu pengerjaan menjadi penting agar bahan baku yang dipakai tetap efisien. Selain itu, karena bergerak pada pasar yang sempit maka kepuasan konsumen harus dipertahankan. Serta jumlah karyawan dan struktur yang fleksibel membuat seseorang untuk bertanggungjawab pada banyak hal. Oleh sebab itu, kualitas dan motivasi karyawan juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja UMKM (Islami, 2017).

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian, pemerintah perlu memberikan bimbingan dan bantuan untuk mengatasi kelemahan UMKM dalam hal modal dan akses. Salah satu upaya pemerintah ialah meluncurkan program pembiayaan UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan kredit dari pemerintah melalui PT Askrido dan Perum Jamkrindo. Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM.

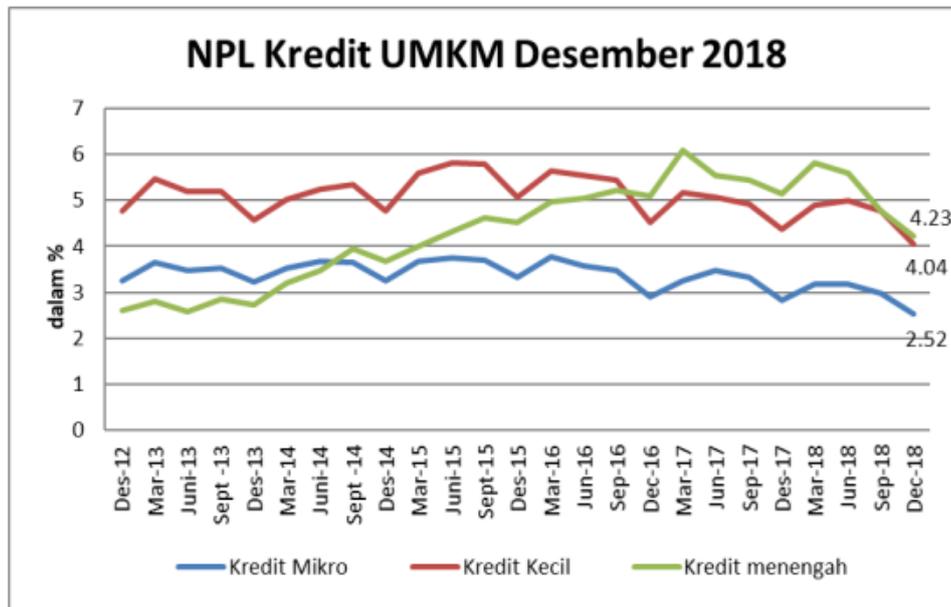
Kredit UMKM merupakan kredit kepada debitur yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Menurut jenis penggunaannya, terdapat dua jenis penggunaan kredit UMKM, yaitu kredit yang digunakan untuk investasi, dan kredit yang digunakan untuk modal kerja.



**Gambar 1.1**  
**Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan**  
*Sumber : website Bank Indonesia, 2018*

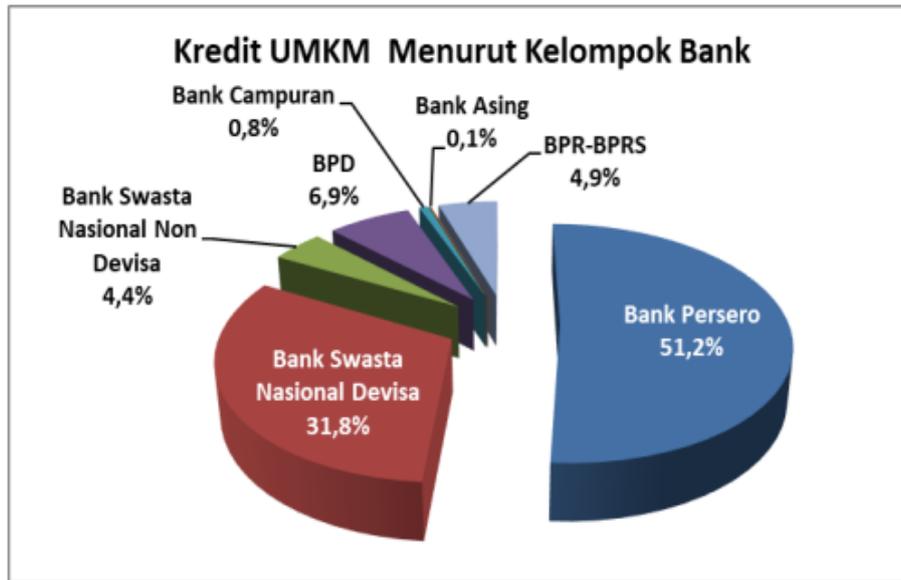
Berdasarkan gambar diagram diatas dapat disimpulkan bahwa kredit UMKM sebagian besar digunakan sebagai modal kerja sebesar 74,7%. Sementara untuk kredit investasi hanya mencapai 25,3%. Melalui KUR ini pihak peminjam tidak perlu memberikan agunan kepada bank karena sudah dijamin oleh pemerintah. Akan tetapi, meskipun program KUR ini sudah dijamin pemerintah, tetap saja terdapat berbagai risiko. Salah satunya adalah risiko mengenai kelancaran pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh debitur yang mengakibatkan semakin naiknya NPL bank apabila banyak terjadi kredit macet. Terjadinya keterlambatan pengembalian cicilan kredit dari debitur ini dikarenakan belum optimalnya UMKM dalam mewujudkan peran dan kemampuannya dalam dunia bisnis, karena masih banyaknya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. *Non Performing Loan* (NPL) kredit UMKM secara keseluruhan pada akhir Triwulan IV 2018 tercatat

sebesar 3,74% menurun dibandingkan rasio NPL kredit pada teriwulan sebelumnya sebesar 4,31% (Bank Indonesia, 2018).



**Gambar 1.2**  
**NPL Kredit UMKM**  
*Sumber : website Bank Indonesia, 2018*

Berdasarkan NPL kredit UMKM, NPL tertinggi terjadi pada kredit usaha menengah sebesar 4,23% dan terendah terjadi pada kredit usaha mikro sebesar 2,52%. Sedangkan NPL kredit usaha kecil tercatat sebesar 4,04%. Sedangkan berdasarkan kelompok bank, terdapat 7 jenis kelompok bank yaitu kelompok Bank Persero, kelompok Bank Swasta Nasional, BPD, BPR/BPRS, Bank Swasta Non Devisa, Bank Campuran, dan Bank Asing.



**Gambar 1.3**  
**Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank**  
*Sumber : website Bank Indonesia, 2018*

Berdasarkan kelompok bank, kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Persero sebanyak Rp 555,6 triliun (51,2%), diikuti kelompok Bank Swasta Nasional Devisa sebesar Rp 345,0 triliun (31,8%), BPD Rp 75,2 triliun (6,9%), BPR/BPRS Rp 53,4 triliun (4,9%), Bank Swasta Non Devisa sebesar Rp 47,3 triliun (4,4%), Bank Campuran Rp 8,6 triliun (0,8%), dan Bank Asing Rp 840,1 triliun (0,1%).

Pemerintah meningkatkan akses modal bagi UMKM dengan memangkas bunga KUR dari 7% menjadi 6%. Pemangkasan tersebut merupakan yang kelima dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah berharap penurunan bunga membuat semakin banyak pelaku UMKM yang mengajukan KUR untuk usaha mereka, sehingga bisa semakin berkembang. Menurut Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun, meskipun bunga KUR sudah diturunkan oleh pemerintahan Presiden

Jokowi sebanyak lima kali, tetapi manfaatnya belum banyak dinikmati oleh pelaku UMKM sampai saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menyalurkan KUR lewat perbankan. Kebijakan tersebut cukup menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR, karena banyak syarat yang harus dipenuhi salah satunya soal perizinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah kebijakan penyaluran KUR. Alternatif penyaluran yang disarankan Akumindo, dengan menggunakan lembaga keuangan nonbank, seperti koperasi (CNN Indonesia, 2019).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan selain masalah penyaluran, agar penurunan bunga KUR bisa memberikan manfaat kepada pelaku UMKM, pemerintah perlu mengevaluasi masa tenggang pengembalian kredit. Evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi. Selama ini, KUR banyak tersalur ke sektor perdagangan bukan ke sektor produktif (pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya). Hal tersebut dipicu oleh persamaan perlakuan antara penerima KUR. Perlakuan harusnya berbeda, tergantung jenis kegiatan ekonominya. Untuk pertanian, memerlukan waktu pengembalian yang lebih lama dibanding sektor perdagangan maupun jasa. Pertanian butuh waktu dari proses penanaman sampai dengan panen dan menerima keuntungan, sehingga perlu ada masa tenggang dalam waktu tertentu (CNN Indonesia, 2019).

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan pendamping pada pelaku UMKM penerima KUR. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mendampingi penerima KUR dalam menjalankan usaha mereka. Semestinya

pemerintah mendampingi mereka, seperti mengurus izin, sertifikasi BPOM, dan lainnya. Jadi penerima KUR dapat fasilitas pengembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM tersebut

Penelitian terdahulu yang membahas tentang *religiosity*, dan *financial literacy* sudah banyak dilakukan, seperti Ahad (2012) yang meneliti hubungan religiusitas dan spiritualitas terhadap kinerja karyawan di organisasi multi-budaya dan multi-agama di Malaysia, Padhi (2018) yang menganalisis hubungan antara religiusitas dan sikap CSR pelaku UKM di India, Elias (2019) yang meneliti pengaruh religiusitas pelaku usaha terhadap kinerja pada UMKM industri makanan dan minuman di Malaysia, Siekei et.al (2013) yang meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Kenya, Barte (2012) yang meneliti pengaruh *financial literacy* terhadap usaha mikro di Filipina, Wise (2013) yang menganalisis dampak *financial literacy* pada kelangsungan hidup usaha baru di Kanada, dan Ndiege et.al., (2016) yang menganalisis hubungan antara kinerja keuangan dan manajemen pengembalian pinjaman di Tanzania. Namun, penelitian tentang *religiosity*, *financial literacy*, *performance* dan *loan repayment* belum banyak dilakukan, terutama untuk sektor UMKM di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kajian *Religiosity* dan *Financial Literacy* terhadap *Performance* dan *Loan Repayment* pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Padang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Religiosity* terhadap *Performance* pada UMKM di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh *Religiosity* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Performance* pada UMKM di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh *Performance* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Religiosity* terhadap *Performance* pada UMKM di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Religiosity* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Performance* pada UMKM di Kota Padang.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Performance* terhadap *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Sektor Perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank atau lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman modal kerja untuk UMKM, dengan melihat kualitas dari UMKM, kinerja UMKM, dan bentuk tanggung jawab UMKM dalam melakukan pinjaman modal kerja, serta mengembalikan pinjamannya. Sehingga bank dapat menyalurkan kredit yang lebih efektif dan meminimalkan kredit yang tidak lancar pada UMKM.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan ilmu, wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai pengaruh *religiosity* dan *financial literacy* terhadap *performance* dan *loan repayment* pada UMKM di Kota Padang. Serta dapat menerapkan disiplin ilmu yang di dapat di perkuliahan, berpikir kritis, sistematis, dan mampu mengaplikasikan teori.

### 3. Bagi UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM dan membantu UMKM untuk memahami pentingnya literasi keuangan dalam mengembangkan bisnisnya. Karena sangat penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui standar apa saja yang dibutuhkan dalam hal *religiosity* dan *financial literacy*, agar usahanya dapat meningkatkan kinerja UMKM dan tanggung jawab dalam pengembalian pinjamannya.

### 4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan tambahan informasi untuk kajian di masa yang akan datang terkait dengan kajian *Religiosity* dan *Financial Literacy* terhadap *Performance* dan *Loan Repayment* pada UMKM di Kota Padang.

### 5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar pemerintah dapat memperhatikan setiap UMKM yang ada dengan memberikan bantuan kepada UMKM, baik berupa bantuan pelatihan, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, maupun bantuan materi atau dana.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup yang hanya fokus membahas kajian *religiosity* dan *financial literacy* terhadap *performance* dan *loan repayment* pada UMKM di Kota Padang. Adapun data yang digunakan diperoleh dari melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kota Padang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Literatur**

Bab ini menguraikan landasan teori tentang konsep teoritis yang merupakan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian yang digunakan, populasi dan sampel dalam penelitian, jenis dan sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data dalam penelitian, definisi operasional serta analisis variabel dan teknik analisa data.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang proses penyebaran data, karakteristik responden, analisis deskriptif penelitian, analisis dan pengujian data, serta pembahasan penelitian.

### **BAB V Penutup**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran.

